

**PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK SECARA KEKELUARGAAN
TANPA PENETAPAN PENGADILAN UNTUK KEPENTINGAN TERBAIK
BAGI ANAK BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI**

Oleh

Made Ashisri Irmawanthi, NIM 2214101141

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengangkatan anak secara kekeluargaan tanpa penetapan pengadilan dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum adat Bali, serta mengkaji formulasi pengaturan yang ideal demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 39 mengenai pengangkatan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, khususnya Pasal 17 mengenai kewajiban penetapan pengadilan, serta Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 04/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 tentang Pedoman *Meras Sentana*. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif secara sistematis dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak melalui *Meras Sentana* diakui dan memiliki legitimasi dalam hukum adat Bali, sehingga anak angkat memperoleh kedudukan serta hak dan kewajiban adat sebagai anggota keluarga angkat. Namun, menurut hukum positif Indonesia, pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan belum memberikan kepastian hukum terhadap status dan hak-hak keperdataan anak angkat. Penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan norma mengenai sanksi dalam hukum positif maupun hukum adat Bali. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kedua sistem hukum melalui penguatan pengaturan desa adat guna menjamin kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Hukum Adat Bali, Kepentingan Terbaik bagi Anak, Pengangkatan Anak, Penetapan Pengadilan.

**THE REGULATION OF FAMILY-BASED CHILD ADOPTION WITHOUT
COURT DECREE FOR THE BEST INTERESTS OF THE CHILD UNDER
BALINESE CUSTOMARY LAW**

By

Made Ashisri Irmawanthi, NIM 2214101141

Legal Studies Program

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation of family-based child adoption without a court decree from the perspectives of Indonesian positive law and Balinese customary law, as well as to examine an ideal regulatory framework to ensure the best interests of the child. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The primary legal materials consist of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, particularly Article 39 on child adoption, Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption, particularly Article 17 regarding the requirement of a court decree, and the Decision of the Third Grand Assembly of the Balinese Customary Village Council Number 04/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 concerning the Meras Sentana Guidelines. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using a systematic and argumentative approach. The findings reveal that child adoption through Meras Sentana is recognized and has legal legitimacy under Balinese customary law, granting adopted children the status, rights, and customary obligations of family members. However, under Indonesian positive law, adoption without a court decree does not provide legal certainty regarding the legal status and civil rights of adopted children. The study also identifies a legal vacuum concerning sanctions in both Indonesian positive law and Balinese customary law. Therefore, harmonization between the two legal systems through strengthening customary village regulations is necessary to ensure legal certainty and uphold the best interests of the child.

Keywords: *Balinese Customary Law, Best Interests of the Child, Child Adoption, Court Decree.*